



# ALSA LEGAL WRITINGS

POLEMIK REFORMULASI KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

[alsalcunhas.org](https://alsalcunhas.org)



ALSA LC UNHAS  
2024/2025 PERIOD

## Polemik Reformulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Oleh: Ismail Dhiandra Recoferry & Adela El Syaqqinah Ihsan

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Menilik beberapa waktu tahun terakhir, Indonesia dihadapi dengan banyaknya tantangan dimulai dari keadaan global yang memberi tekanan keras, “badai gelombang” pemutusan hubungan kerja, kemudian diperparah dengan produktivitas dalam negeri menurun sehingga membuat pertumbuhan konsumsi masyarakat terhambat. Bank dunia (*World bank*) membuat tanggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun kedepan akan sulit tumbuh naik mencapai level 5%. Tak hanya itu, Bank dunia menyusun prediksi ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh mencapai 4,7% pada 2025 dan 2,8% pada 2026. Ini merupakan hasil revisi dari prediksi yang telah dibuat sebelumnya yaitu terdapat di angka 5,1% pada tahun 2025 dan 2026.<sup>1</sup> Terlambatnya pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan memberikan beberapa dampak atau “kerusakan” yang akan dialami oleh Indonesia yaitu kepercayaan investor menurun, angka pengangguran bertambah, daya beli menurun dan bertambahnya kemiskinan, pendapatan negara menjadi terkendala, stagnasi gaji atau bahkan menurun. Di tengah-tengah penghambatan ini, terdapat juga tantangan lain yang dapat memperburuk situasi ekonomi yaitu tingginya ketergantungan terhadap barang atau jasa impor. Dari ketergantungan yang tinggi ini tidak hanya menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan nasional, tetapi juga melemahkan daya saing industri lokal di perdagangan domestik. Ketika produktivitas dalam negeri menurun dan daya beli masyarakat juga kecil serta penggunaan barang atau jasa impor juga terus meningkat, maka kondisi perekonomian negara akan semakin melemah disebabkan oleh faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan kondisi ini, telah mencerminkan betapa rentannya struktur ekonomi nasional ketika terlalu bergantung pada produk luar negeri, terlebih saat kapasitas produksi domestik belum mampu bersaing dari segi harga maupun kualitas. Tingginya impor bahan baku, barang modal, hingga jasa dari luar negeri memang sukar dihindari, mengingat belum meratanya kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional

---

<sup>1</sup>Elga Nurmutia, ‘Kupas Tuntas Kondisi Ekonomi RI Di Tengah Ketidakpastian Global’ (*CNBC Indonesia* 17 June 2025)  
<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250617185125-4-641796/kupas-tuntas-kondisi-ekonomi-ri-di-tengah-ketidakpastian-global>> accessed 10 June 2025.

secara mandiri. Namun, apabila ketergantungan ini tidak segera diatasi, maka ruang pertumbuhan industri lokal akan semakin menyempit, yang pada akhirnya berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi nasional.

Di Indonesia, aktivitas impor menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri dikarenakan bahan baku, komponen, dan teknologi yang tersedia di Indonesia masih sangat minim. Namun, dari kegiatan ini memberi dampak negatif kepada industri lokal dikarenakan ketergantungan yang besar dalam produk impor sehingga industri lokal menjadi sulit berkembang dan menjadi penghambat laju ekonomi yang mandiri.

Demi mencegah hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mendorong perkembangan industri lokal, kebijakan ini diharap meningkatkan penggunaan bahan atau jasa yang tersedia dalam negeri sehingga membuka peluang para pelaku industri untuk berkembang.<sup>2</sup> Tak hanya itu, dari kebijakan tersebut juga diharapkan menarik investor untuk melakukan investasi terhadap industri lokal di berbagai sektor. Dari kebijakan ini juga dapat menekankan ketergantungan terhadap impor sehingga dapat menguatkan perekonomian dalam negeri.<sup>3</sup>

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia demi memperkuat rantai pasokan dalam negeri, tujuan dari dibuatnya TKDN ini adalah untuk mendorong industri lokal membeli atau menggunakan produk dan jasa dalam negeri serta memberdayakan pasar lokal agar menjadi kuat dan kompetitif demi mendukung pertumbuhan perindustrian Indonesia.<sup>4</sup>

Akan tetapi, terdapat juga hambatan atau tantangan seperti pemahaman yang minim dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pengada sehingga menghasilkan indikasi pelanggaran administratif, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan sertifikat TKDN, dan persentase minimal penggunaan produk lokal yang tidak dipenuhi. Selain itu, kebijakan TKDN yang hadir saat ini malah membatasi para industri dalam memperoleh

<sup>2</sup>Gakindo, 'TKDN, Pengertian Dan Dampaknya Bagi Industri Otomotif – GAIKINDO' (Gaikindo.or.id2019) <<https://www.gaikindo.or.id/tkdn-pengertian-dan-dampaknya-bagi-industri-otomotif/>> accessed 10 June 2025.

<sup>3</sup> E Ernawati, 'Gambaran Umum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia' (2021) erepository <<https://erepository.uwks.ac.id/11071/>>

<sup>4</sup>Raden and Laili Ira, 'Pengertian TKDN, Manfaat, Dan Rumus Perhitungannya' (TempoFebruary 2025) <<https://www.tempo.co/ekonomi/pengertian-tkdn-manfaat-dan-rumus-perhitungannya-1201364>>.

komponen produksi yang lebih murah.<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan TKDN yang dapat dirancang dan diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan daya saing industri, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat diperkuat untuk mencegah penyimpangan dalam praktik pengadaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kebijakan TKDN sebelum reformulasi untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri di Indonesia?
2. Bagaimana latar belakang dan poin reformulasi kebijakan TKDN?
3. Bagaimana bentuk pengawasan hukum dan peran pemerintah atas reformulasi yang terjadi untuk mencegah pelanggaran administratif?

---

<sup>5</sup> Center for Indonesian Policy Studies Center, 'Kebijakan TKDN Sulitkan Integrasi Indonesia Ke Rantai Nilai Global' (CIPS | Think Tank 21 October 2024) <<https://www.cips-indonesia.org/post/kebijakan-tkdn-sulitkan-integrasi-indonesia-ke-rantai-nilai-global?lang=id>> accessed 10 June 2025.

## BAB II PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Kebijakan TKDN Sebelum Reformulasi untuk Mendorong Penggunaan Produk dalam Negeri di Indonesia

Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) merupakan persentase komponen dalam negeri yang digunakan untuk menentukan besaran nilai atau persentase penggunaan bahan, komponen serta jasa lokal yang terkandung dalam suatu produk barang atau jasa. Dengan kata lain, TKDN mengukur seberapa besar kandungan produk dalam negeri, dalam suatu produk yang diproduksi atau digunakan di Indonesia. Kebijakan TKDN diterapkan. Pemerintah dengan tujuan mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendukung pertumbuhan dan daya saing industri lokal, memberdayakan industri nasional agar lebih kuat dan kompetitif, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.<sup>6</sup>

Kebijakan TKDN di Indonesia diatur secara komprehensif mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Menteri Perindustrian yang mengatur teknis penghitungan dan implementasinya di berbagai sektor industri. Regulasi TKDN sangat dinamis dan spesifik menurut sektor industri, sehingga aturan teknis dapat berbeda pada setiap sektor strategis nasional. Dasar hukum TKDN di Indonesia termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Selain itu, terdapat beberapa aturan lain yang merupakan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri. Seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasar pada regulasi tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama program TKDN adalah memberdayakan industri dalam negeri agar lebih kuat dan kompetitif. Sehingga, pemerintah telah menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Laili Ira, Op. Cit.

<sup>7</sup> Wahyuni W, 'Apa Itu TKDN, Manfaat, Jenis Perhitungannya, Dan Tujuannya' (hukumonline.com 9 April 2025) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-tkdn--manfaat--jenis-perhitungannya--dan-tujuannya-lt67f626c6740a4/?page=1>> accessed 11 June 2025.

Selain regulasi tersebut yang mengakomodir mengenai TKDN, pengaturan lebih rinci juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang merupakan dasar hukum utama pemberlakuan TKDN untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan penguatan industri nasional. Mulanya, acuan utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri ber-TKDN adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, disesuaikan lagi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait prioritas TKDN yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018. Selain itu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 yang secara keseluruhan membahas tentang penetapan persentase minimal komponen lokal dalam pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan partisipasi industri domestik dalam proyek-proyek pemerintah.

Dari segi pemerintah dimana dalam proses teknis TKDN, pemerintah mendorong penerapan TKDN melalui wajib sertifikasi TKDN, pengutamaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberian preferensi harga bagi produk lokal dalam tender. Sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, alat kesehatan, dan konstruksi menjadi fokus utama penerapan kebijakan ini. Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif fiskal maupun non-fiskal untuk pelaku industri yang mampu meningkatkan kandungan lokal dalam produksinya.

Namun beberapa regulasi yang hadir saat ini belum mampu mengakomodir realita TKDN yang bersifat dinamis. TKDN perlu dirancang agar fleksibel dan realistis agar kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri secara efektif.<sup>8</sup> Fleksibilitas dalam TKDN memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai dinamika, baik di tingkat industri maupun global. Selain itu, TKDN perlu dirancang agar realistis, artinya harus didasarkan pada kemampuan dan kapasitas industri dalam negeri yang sebenarnya, bukan hanya pada keinginan.

## 2. Latar Belakang dan Poin Reformulasi Kebijakan TKDN

Lahirnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia berakar dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional,

<sup>8</sup>Allisa Luthfia, 'Regulasi TKDN Dinilai Perlu Lebih Fleksibel, Apa Itu TKDN?' (Antara News 14 April 2025) <<https://www.antarane.ws.com/berita/4771093/regulasi-tkdn-dinilai-perlu-lebih-fleksibel-apa-itu-tkdn>> accessed 11 June 2025.

memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada impor. TKDN menjadi indikator penting dalam pembangunan industri karena mendorong penggunaan bahan baku dan komponen lokal dalam proses produksi. Seiring perkembangan industri dan kebutuhan pasar, pemerintah melakukan reformulasi kebijakan TKDN agar lebih adaptif, fleksibel, dan realistis.

Urgensi reformulasi kebijakan kemudian diperkuat berdasarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025, menginstruksikan agar regulasi TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri nasional di pasar global. Presiden menekankan bahwa meskipun niat awal TKDN adalah baik dan nasionalistik, penerapannya yang terlalu kaku dapat menghambat kompetitivitas industri dalam negeri. Beliau menyarankan agar pendekatan TKDN mungkin diganti dengan insentif, dan menekankan bahwa kemampuan dalam negeri terkait konten lokal adalah masalah yang luas, mencakup aspek pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.<sup>9</sup> Pernyataan Presiden ini mencerminkan kebutuhan untuk meninjau kembali kebijakan TKDN, tidak hanya dari segi substansi hukum, tetapi juga dari perspektif implementasi dan dampaknya terhadap industri nasional.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa poin utama reformulasi TKDN untuk menciptakan keseimbangan penggunaan produk dalam negeri dan menjawab tantangan pasar industri, diantaranya;

- Penyesuaian batas minimal TKDN dimana dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, pemerintah menetapkan batas minimal TKDN sebesar 25% untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, BUMN, dan BUMD. Jika produk dalam negeri dengan TKDN di atas 25% tidak tersedia, tetap dapat menggunakan produk dengan TKDN di bawah 25% atau produk yang terdaftar dalam sistem informasi industri nasional.<sup>10</sup>
- Peningkatan insentif dan preferensi Pemberian merupakan inti dari reformulasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia. Tujuannya adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri secara lebih efektif dan kompetitif, tanpa membebani pelaku industri. Selain itu, adanya peningkatan yang berarti pemerintah memberikan berbagai kemudahan atau keuntungan

<sup>9</sup>Wahyuni, Op. Cit.

<sup>10</sup> Afiffah Rahmah Nurdifa and Denis Riantiza Meilanova, 'Prabowo Revisi Aturan TKDN Untuk Belanja Pemerintah/BUMN Jadi Minimal 25%' (*Bisnis.com* 7 May 2025) <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250507/257/1875038/prabowo-revisi-aturan-tkdn-untuk-belanja-pemerintah-bumn-jadi-minimal-25>> accessed 11 June 2025.

bagi pelaku industri yang mampu memenuhi atau melampaui persentase TKDN tertentu. Bentuk dari peningkatan insentif salah satunya ialah *tax allowance* dan *tax holiday* untuk industri yang meningkatkan kandungan lokal.

- Penyesuaian Metodologi Penghitungan

Ada kemungkinan penyesuaian dalam metodologi penghitungan TKDN untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan dinamika pasar terkini. Hal ini memastikan bahwa perhitungan TKDN tetap relevan dan akurat. Seiring dengan perubahan teknologi yang cepat, metode penghitungan yang digunakan saat ini mungkin perlu diperbarui agar mencerminkan nilai tambah yang lebih baik dari komponen lokal dalam produk akhir. Selain itu, pendekatan baru dalam penghitungan dapat membantu mengidentifikasi dan mengakomodasi inovasi yang muncul di industri. Penyesuaian ini juga penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi TKDN.<sup>11</sup>

Upaya pemerintah Indonesia yang telah menjalankan program insentif berbasis TKDN dapat kita lihat pada Sektor kendaraan listrik sebagai salah satu contoh paling jelas di mana insentif berbasis TKDN telah diterapkan dan terbukti berhasil menarik investasi serta mendorong produksi lokal. Produsen yang berkomitmen mencapai target TKDN tertentu mendapatkan keuntungan berupa insentif pajak yang signifikan, membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar.<sup>12</sup> Pemerintah juga telah memberikan pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan pabrik yang belum dapat diproduksi di dalam negeri untuk mendorong investasi dan modernisasi industri. Hal ini membantu menekan biaya investasi awal bagi pelaku industri yang ingin mengembangkan atau meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia.

Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan kemudahan non-fiskal seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan usaha melalui sistem OSS ini dengan harapan mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan bagi pelaku industri untuk memulai atau mengembangkan usahanya, sehingga lebih fokus pada produksi dan peningkatan TKDN. Pemerintah melalui berbagai lembaga juga menjalankan program peningkatan kapasitas industri seperti pelatihan dan pengembangan SDM. Pemerintah

<sup>11</sup>Masterkonsultan, 'Aturan TKDN Terbaru 2025, Apa Saja Yang Berubah? - Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri' (Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri19 February 2025) <<https://konsultanindustri.com/aturan-tdkn-terbaru-2025/>> accessed 11 June 2025.

<sup>12</sup>Agnes Z Yonatan, 'Regulasi TKDN Mau Dibuak Lebih Fleksibel & Realistis' (GoodStats9 April 2025) <<https://goodstats.id/article/regulasi-tdkn-mau-dibuak-lebih-fleksibel-dan-realistis-mb6gS>> accessed 11 June 2025.

menyelenggarakan program pelatihan vokasi dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja industri. Banyak program pembinaan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) agar mereka dapat menjadi pemasok komponen bagi industri besar. Hal ini diharapkan menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dan memperluas basis industri domestik.<sup>13</sup>

Penyesuaian ambang batas TKDN yang berbasis pengelompokan sektor industri merupakan strategi penting untuk menjadikan kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis, tentu dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor industri. Pemerintah tidak hanya menetapkan satu ambang batas TKDN yang seragam, melainkan menetapkan ambang batas yang bervariasi sesuai sektor industri. Tindakan pemerintah ini memungkinkan penyesuaian standar TKDN sesuai tingkat kematangan dan kemampuan teknologi di setiap sektor.<sup>14</sup> Selain strategi penyesuaian ambang batas tersebut, terdapat berbagai pendekatan lainnya yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produk lokal secara bertahap. Pendekatan-pendekatan tersebut seperti melakukan revisi regulasi sektoral, agar sesuai dengan perkembangan industri dan kapasitas lokal, mengintegrasikan persyaratan BMP untuk memastikan manfaat ekonomi dalam negeri, serta menggunakan pendekatan kumulatif TKDN yang memberi kelonggaran alokasi bobot TKDN antar komponen.<sup>15</sup>

Reformulasi kebijakan TKDN dilakukan untuk menjawab tantangan industri nasional, memperkuat penggunaan produk dalam negeri, dan menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan adaptif. Penyesuaian batas minimal TKDN, penyederhanaan proses, pemberian insentif, serta fleksibilitas regulasi menjadi kunci utama agar kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan industri tanpa menurunkan daya saing nasional.

### **3. Bentuk Pengawasan Hukum dan Peran Pemerintah atas Reformulasi yang terjadi untuk Mencegah Pelanggaran Administratif**

Upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional, pemerintah Indonesia telah menerapkan melakukan reformulasi kebijakan

<sup>13</sup>Tolok, Op.Cit.

<sup>14</sup>Muhammad Darisman, 'Kemenperin Ungkap Progres Rencana TKDN Naik Jadi 40 Persen' (kumparan7 January 2025) <<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenperin-ungkap-progres-rencana-tkdn-naik-jadi-40-persen-24FyfGf77QF>> accessed 12 June 2025.

<sup>15</sup> Lia Astuti Ningsih, 'Semua Tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)' (infiniti.id2025) <<https://infiniti.id/blog/legal/semua-tentang-tkdn>> accessed 12 June 2025.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu instrumen strategis. Namun, implementasi kebijakan TKDN sebelum reformulasi sering kali menemui berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap nilai TKDN, serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan hukum atas pelaksanaan TKDN belum berjalan optimal. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan TKDN tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai kandungan lokal, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan hukum dan tata kelola administratif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan akuntabel melalui penguatan regulasi, digitalisasi pengawasan, pelibatan lembaga pengaudit negara, serta koordinasi lintas sektor. Pengawasan yang efektif menjadi kunci agar reformulasi kebijakan TKDN tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan daya saing industri dalam negeri. Dalam reformulasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terbaru, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan hukum dan perannya untuk mencegah pelanggaran administratif dan memastikan kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan TKDN. Berikut bentuk pengawasan dan peran pemerintah yang dapat diimplementasikan;

- Penguatan Mekanisme Verifikasi dan Sertifikasi  
Pemerintah memperketat mekanisme verifikasi TKDN dengan melibatkan lembaga verifikasi independen yang kompeten untuk memastikan keabsahan data dan dokumen yang diajukan produsen. Proses sertifikasi dibuat lebih sederhana, cepat (sekitar 10 hari), dan berbiaya murah untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi potensi manipulasi.<sup>16</sup>
- Pelaksanaan Audit dan Surveillance Berkala  
Pemerintah melakukan audit berkala dan surveillance terhadap perusahaan bersertifikat TKDN untuk memastikan produk tetap memenuhi standar TKDN, bukan hanya memenuhi persyaratan administratif semata. Audit ini juga dilakukan jika terjadi perubahan signifikan pada komponen produksi yang dapat mempengaruhi nilai TKDN.<sup>17</sup>
- Peningkatan Penegakan Sanksi Administratif

<sup>16</sup> Ghani Nurcahyadi, 'Kebijakan TKDN Perlu Selektif, Ini Alasannya' (Mediaindonesia.com 9 May 2023) <<https://mediaindonesia.com/ekonomi/579876/kebijakan-tkdn-perlu-selektif-ini-alasannya?>> accessed 12 June 2025.

<sup>17</sup> Hipelki, 'Menjaga Konsistensi TKDN Untuk Keberlanjutan Industri Alkes Nasional' (Hipelki 24 March 2025) <<https://hipelki.or.id/menjaga-konsistensi-tkdn-untuk-keberlanjutan-industri-alkes-nasional/>>.

Regulasi terbaru memperkuat sanksi berupa pencabutan sertifikat TKDN, denda, atau larangan mengikuti pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan TKDN. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera dan menjaga integritas kebijakan TKDN.

Pengawasan hukum dalam reformulasi TKDN meliputi mekanisme verifikasi yang diperketat, audit dan surveillance berkala, serta penegakan sanksi administratif. Pemerintah berperan aktif dalam penyusunan regulasi, koordinasi antar lembaga, sosialisasi, dan pemberian insentif dengan pengawasan ketat. Langkah-langkah ini bertujuan mencegah pelanggaran administratif, memastikan integritas sertifikasi TKDN, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri secara berkelanjutan.

### BAB III PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan strategi penting pemerintah Indonesia untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, memperkuat daya saing industri nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Sebelum reformulasi, kebijakan TKDN telah diatur melalui berbagai regulasi dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri. Namun, penerapannya sering kali menemui kendala seperti kurangnya fleksibilitas, lemahnya pengawasan, dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran.

Reformulasi kebijakan TKDN dilakukan untuk menjawab dinamika industri yang terus berkembang, serta instruksi Presiden agar TKDN menjadi lebih fleksibel dan realistis. Perubahan kebijakan ini mencakup penyesuaian ambang batas TKDN minimum, peningkatan insentif fiskal dan non-fiskal, penyederhanaan proses sertifikasi, serta penyesuaian metodologi penghitungan agar relevan dengan kondisi pasar dan teknologi saat ini. Pemerintah juga mengelompokkan ambang batas TKDN sesuai sektor industri untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing sektor.

Selain itu, aspek pengawasan hukum dan administratif turut diperkuat melalui verifikasi dan audit berkala, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran untuk menjaga integritas kebijakan. Pemerintah berperan aktif dalam regulasi, koordinasi lintas lembaga, sosialisasi, dan pendampingan pelaku industri, khususnya UMKM dan IKM. Dengan langkah-langkah ini, reformulasi TKDN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

#### B. Saran

Untuk memperkuat implementasi kebijakan TKDN, disarankan agar pemerintah menyesuaikan ambang batas TKDN sesuai sektor industri, menyederhanakan proses sertifikasi, serta meningkatkan insentif bagi pelaku industri yang memenuhi target kandungan lokal. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui digitalisasi, audit berkala, dan penegakan sanksi yang tegas. Selain itu, penting mendorong kolaborasi lintas sektor, integrasi dengan pendidikan vokasi, serta evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffah Rahmah Nurdifa and Denis Riantiza Meilanova, ‘Prabowo Revisi Aturan TKDN Untuk Belanja Pemerintah/BUMN Jadi Minimal 25%’ (Bisnis.com7 May 2025) <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250507/257/1875038/prabowo-revisi-aturan-tkdn-untuk-belanja-pemerintahbumn-jadi-minimal-25>> accessed 11 June 2025.
- Allisa Luthfia, ‘Regulasi TKDN Dinilai Perlu Lebih Fleksibel, Apa Itu TKDN?’ (Antara News14 April 2025) <<https://www.antarane.ws.com/berita/4771093/regulasi-tkdn-dinilai-perlu-lebih-fleksi-bel-apa-itu-tkdn>> accessed 11 June 2025.
- Agnes Z Yonatan, ‘Regulasi TKDN Mau Dibuat Lebih Fleksibel & Realistis’ (GoodStats9 April 2025) <<https://goodstats.id/article/regulasi-tkdn-mau-dibuat-lebih-fleksibel-dan-realistic-mb6gS>> accessed 11 June 2025.
- Center for Indonesian Policy Studies Center, ‘Kebijakan TKDN Sulitkan Integrasi Indonesia Ke Rantai Nilai Global’ (CIPS | Think Tank 21 October 2024) <<https://www.cips-indonesia.org/post/kebijakan-tkdn-sulitkan-integrasi-indonesia-ke-rantai-nilai-global?lang=id>> accessed 10 June 2025.
- Elga Nurmutia, ‘Kupas Tuntas Kondisi Ekonomi RI Di Tengah Ketidakpastian Global’ (CNBC Indonesia17 June 2025) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250617185125-4-641796/kupas-tuntas-kondisi-ekonomi-ri-di-tengah-ketidakpastian-global>> accessed 10 June 2025.
- Ernawati Ernawati, ‘Gambaran Umum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Di Indonesia - UWKS - Library’ [2021] Uwks.ac.id <<http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11071>> accessed 26 June 2025.
- Gakindo, ‘TKDN, Pengertian Dan Dampaknya Bagi Industri Otomotif – GAIKINDO’ (Gaikindo.or.id2019) <<https://www.gaikindo.or.id/tkdn-pengertian-dan-dampaknya-bagi-industri-otomotif/>> accessed 10 June 2025.
- Ghani Nurcahyadi, ‘Kebijakan TKDN Perlu Selektif, Ini Alasannya’ (Mediaindonesia.com9 May 2023) <<https://mediaindonesia.com/ekonomi/579876/kebijakan-tkdn-perlu-selektif-ini-alasannya?>>> accessed 12 June 2025.

- Hipelki, ‘Menjaga Konsistensi TKDN Untuk Keberlanjutan Industri Alkes Nasional’ (Hipelki24 March 2025) <<https://hipelki.or.id/menjaga-konsistensi-tkdn-untuk-keberlanjutan-industri-alkes-nasional/>>.
- Lia Astuti Ningsih, ‘Semua Tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)’ (infiniti.id2025) <<https://infiniti.id/blog/legal/semua-tentang-tkdn>> accessed 12 June 2025.
- Masterkonsultan, ‘Aturan TKDN Terbaru 2025, Apa Saja Yang Berubah? - Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri’ (Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri19 February 2025) <<https://konsultanindustri.com/aturan-tkdn-terbaru-2025/>> accessed 11 June 2025.
- Muhammad Darisman, ‘Kemenperin Ungkap Progres Rencana TKDN Naik Jadi 40 Persen’ (kumparan7 January 2025) <<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenperin-ungkap-progres-rencana-tkdn-naik-jadi-40-persen-24FyfGf77QF>> accessed 12 June 2025.
- Raden and Laili Ira, ‘Pengertian TKDN, Manfaat, Dan Rumus Perhitungannya’ (TempoFebruary 2025) <<https://www.tempo.co/ekonomi/pengertian-tkdn-manfaat-dan-rumus-perhitungannya-1201364>>.
- Wahyuni W, ‘Apa Itu TKDN, Manfaat, Jenis Perhitungannya, Dan Tujuannya’ (hukumonline.com9 April2025) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-tkdn--manfaat--jenis-perhitungannya--dan-tujuannya-lt67f626c6740a4/?page=1>> accessed 11 June 2025.